

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Nurlita Riefa Arifiyanti¹, Gebriela Novalita Tatika Putri², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

Email : 25040674302@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674303@mhs.unesa.ac.id²,
indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Abstrak

Kesenjangan dalam bidang pendidikan di Indonesia, terutama di daerah 3T yaitu daerah yang tertinggal, terluar, dan terpencil, masih menjadi permasalahan yang sangat serius di negeri ini. Ketimpangan dalam bidang pendidikan masih menjadi isu utama, terutama di daerah yang menghadapi masalah infrastruktur, jumlah dan kualitas guru yang tidak merata, serta akses teknologi yang masih kurang memadai. Penelitian ini mengevaluasi pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai strategi utama untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, hambatan seperti anggaran yang tersebar di berbagai daerah dan kesulitan dalam mengkoordinasikan antar daerah masih menghambat pelaksanaannya. Pendidikan di daerah terpencil memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. Solusi yang dapat diterapkan meliputi penggunaan teknologi pendidikan yang tidak memerlukan akses internet, pemberdayaan guru melalui insentif, serta pengembangan program pendidikan berbasis masyarakat. Penelitian ini juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan pendidikan secara lebih mandeksentral, bekerja sama dengan sektor swasta, dan menggunakan teknologi agar pendidikan bisa merata serta mengurangi perbedaan sosial dan ekonomi secara bertahap.

Kata Kunci: Kesenjangan Pendidikan, Daerah 3T, Infrastruktur Pendidikan.

Abstract

The gap in education in Indonesia, especially in 3T areas, namely disadvantaged, outermost, and remote areas, remains a very serious problem in this country. Inequality in education is still a major issue, especially in areas facing problems with infrastructure, uneven numbers and quality of teachers, and inadequate access to technology. This study evaluates the development of educational infrastructure as a key strategy for realizing quality, inclusive, and sustainable education. The research method uses a qualitative approach. However, obstacles such as budgets spread across various regions and difficulties in coordinating between regions still hamper its implementation. Education in remote areas requires a more innovative and adaptive approach. Solutions that can be implemented include the use of educational technology that does not require internet access, empowering teachers through incentives, and developing community-based education programs. This study also encourages the government to develop more decentralized education policies, collaborate with the private sector, and use

technology so that education can be evenly distributed and gradually reduce social and economic disparities.

Keywords: *Educational Gap, 3T Regions, Educational Infrastructure.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan yang baik dapat membantu pembangunan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai sosial, kemampuan intelektual, dan keterampilan. Salah satu fokus utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pendidikan dalam konteks pembangunan global. Khususnya pada tujuan keempat yaitu kualitas pendidikan, menekankan betapa pentingnya memberikan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang.

Namun demikian, upaya pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Karena kondisi geografis Indonesia yang beragam, akses pendidikan tidak selalu adil di setiap wilayah. Pendidikan berbeda di daerah perkotaan dan pedesaan karena berbagai faktor, termasuk distribusi tenaga pendidik, kondisi geografis, dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di banyak

daerah terpencil masih mengalami keterbatasan. Keterbatasan ini termasuk bangunan sekolah yang tidak layak, kekurangan ruang kelas, jumlah bahan ajar yang terbatas, dan kurangnya transportasi yang mudah ke sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang tidak sebanding.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berusaha untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan pendidikan. Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah termasuk pembangunan sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, berbagai hambatan masih menghalangi pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan akses di daerah terpencil adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat proses pembelajaran, menurunkan kualitas pendidikan yang diterima siswa, dan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah. Selain itu, tantangan tersendiri dalam mendukung proses pembelajaran yang semakin berkembang di era digital saat ini adalah keterbatasan fasilitas teknologi dan akses internet.

Dengan demikian, kondisi ini membuat pembangunan sistem pendidikan di daerah terpencil menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional. Infrastruktur pendidikan yang memadai tidak hanya membantu siswa belajar, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang baik dan terus meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan berkelanjutan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA (TEORI)

Pembangunan Infrastruktur Pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan akses masyarakat kepadanya, pembangunan infrastruktur pendidikan mencakup sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan media pembelajaran. Ketika ada sarana pendidikan yang memadai, itu dapat membantu membuat lingkungan belajar yang baik. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Prasarana pendidikan didefinisikan sebagai fasilitas pendukung yang secara tidak langsung mendukung proses pembelajaran. Sementara itu, peralatan dan perlengkapan pendidikan digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, menurut Mulyasa (2014). Infrastruktur pendidikan yang baik akan mempengaruhi kualitas pembelajaran dan dorongan siswa untuk belajar. Selain itu, Arikunto (2013) menyatakan bahwa jika ada fasilitas yang memadai, tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan sangat penting untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar.

Oleh karena itu, langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat adalah pembangunan infrastruktur pendidikan.

Pendidikan di wilayah yang terpencil. Jika orang tinggal di daerah terpencil, mereka memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas publik, termasuk pendidikan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, kendala transportasi, dan kekurangan fasilitas pendidikan adalah beberapa faktor yang sering menjadi penghalang bagi orang-orang di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pembangunan wilayah harus mampu mengurangi perbedaan antarwilayah dengan meningkatkan akses ke layanan dasar, seperti pendidikan, menurut Todaro dan Smith (2015). Dalam situasi seperti ini, membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi perbedaan pembangunan antara kota dan pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan sekolah baru, penyediaan ruang belajar, dan peningkatan akses ke institusi pendidikan adalah langkah penting dalam meningkatkan akses masyarakat terpencil ke pendidikan.

Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk memberi semua orang kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah sekolah yang tersedia, tetapi juga berkaitan dengan kualitas fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, dan kemudahan akses ke pendidikan. Dalam teorinya tentang kesetaraan kesempatan pendidikan, Coleman (1966) menjelaskan bahwa lingkungan sekolah dan fasilitasnya sangat memengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah adalah memberi semua orang akses ke pendidikan. Menciptakan keadilan sosial dalam bidang pendidikan melalui pemerataan pendidikan juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya.

Hubungan antara Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan dan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan. Untuk mencapai pemerataan pendidikan

yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pendidikan sangat terkait. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan mendukung proses pembelajaran yang sangat baik. Pembangunan lembaga pendidikan di daerah terpencil dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan. Hal ini tidak hanya akan mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, tetapi juga akan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan metode studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis fenomena pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan hubungannya dengan upaya mewujudkan pemerataan pendidikan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat mengumpulkan berbagai informasi konseptual dan empiris dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan.

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan menganalisis

implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan. Selain itu, penelitian ini melihat dari sudut pandang kebijakan publik bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya Tujuan Keempat, kualitas pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Infrastruktur Pendidikan Di Daerah Terpencil

Infrastruktur pendidikan di daerah terpencil Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Sekolah-sekolah di daerah 3T, yang berarti terdepan, terluar, dan tertinggal, biasanya menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Banyak sekolah yang tidak layak pakai, ruang kelas yang rusak, fasilitas yang terbatas, dan kekurangan listrik serta jaringan internet. Kondisi ini jelas berdampak besar pada pembelajaran di kelas. Selain itu, fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan media teknologi masih sangat terbatas. Akibatnya, siswa-siswi di

daerah terpencil tidak memiliki kesempatan belajar yang sama dengan siswa di kota yang menggunakan teknologi digital.

Sebaliknya, lokasi geografis merupakan salah satu kendala utama yang menghalangi pemerataan infrastruktur pendidikan. Akses yang tidak mudah, seperti harus melalui hutan, sungai, atau wilayah pegunungan, menghambat distribusi bantuan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Selain itu, situasi ini berdampak pada distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Banyak guru juga yang tidak ingin ditempatkan di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan akses untuk masuk. Akibatnya, pendidikan di daerah tersebut cenderung lebih rendah, yang berarti bahwa siswa tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, kekurangan infrastruktur pendidikan ini merupakan salah satu komponen utama yang menghambat upaya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri Indonesia ini.

Analisis Implementasi Kebijakan Infrastruktur Pendidikan

Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, kebijakan infrastruktur pendidikan diterapkan di daerah terpencil.

Banyak kebijakan telah dibuat dan diterapkan, termasuk menyediakan fasilitas belajar, membangun dan memperbaiki gedung sekolah, dan membuat program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Namun, kebijakan tersebut masih menghadapi banyak tantangan saat diterapkan, yang mengakibatkan hasil yang tidak memuaskan. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil tidak dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan karena keterbatasan anggaran, yang merupakan hambatan utama.

Selain itu, ada faktor yang berkontribusi pada koordinasi lembaga dan pemerintah daerah, yang merupakan kendala tambahan dalam pelaksanaan kebijakan. Karena tidak ada sinkronisasi antara perencanaan pusat dan kebutuhan lokal, beberapa program gagal mencapai tujuan mereka atau tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Pembangunan fasilitas pendidikan seringkali tidak diiringi dengan tenaga pendidik yang memadai dan dukungan sarana lainnya. Akibatnya, masyarakat tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kebijakan tersebut. Selain itu, beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan

pendidikan digital termasuk keterbatasan akses ke teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di daerah terpencil.

Selain itu, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik dan kesulitan yang berbeda, penerapan kebijakan infrastruktur pendidikan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif. Kebijakan yang tidak disesuaikan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan geografis merupakan sebuah komunitas cenderung yang tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terpadu untuk memanfaatkan teknologi pendidikan yang sesuai dengan keadaan lokal, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan membangun infrastruktur fisik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya dapat diukur dari jumlah pembangunan fisik yang dilakukan tetapi juga dari seberapa baik kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempertahankan pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.

Tantangan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang

kompleks. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, terutama dalam hal pemerataan dan pembangunan infrastruktur, merupakan salah satu tantangan utama. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN, distribusi anggaran tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, terutama di wilayah terpencil. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan pembangunan pendidikan tertunda dan program rehabilitasi sekolah yang rusak terbatas.

Selain itu, kondisi geografis Indonesia, yang terdiri dari kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil, menjadi hambatan besar untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Aksesibilitas yang rendah membuat distribusi bahan bangunan, tenaga kerja, dan sarana pendukung pembangunan lebih sulit dan lebih mahal. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses pembangunan tetapi juga mengganggu pemeliharaan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, faktor geografis merupakan salah satu hambatan struktural yang mempengaruhi seberapa efektif kebijakan pembangunan pendidikan dilaksanakan.

Lalu keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Tanpa tenaga pendidik yang memadai, infrastruktur pendidikan yang dibangun tidak akan berhasil. Namun, banyak daerah terpencil masih kekurangan guru baik dalam jumlah maupun kualitas. Pendidikan di daerah terpencil cenderung tertinggal dibandingkan dengan di wilayah perkotaan termasuk kekurangan fasilitas pendukung, keterbatasan akses transportasi, dan kurangnya insentif untuk guru yang bekerja di daerah tersebut.

Kolaborasi dengan lembaga pemerintah sangat penting jika tidak adanya kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan maka masalah pembangunan infrastruktur pendidikan tidak akan terselesaikan. Untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan baik, berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, harus bekerja sama dengan baik. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi tumpang tindih kebijakan. Contohnya kurangnya sinkronisasi program, dan kurangnya pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa elemen kelembagaan dan tata kelola pemerintahan masih perlu

diperbaiki untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan dengan baik.

Strategi Kebijakan Dalam Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Strategi kebijakan terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan wilayah adalah strategi utama yang perlu dilakukan. Pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan jumlah anggaran, tetapi juga memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesenjangan infrastruktur di masing-masing daerah. Daerah terpencil yang memiliki kebutuhan yang lebih besar harus menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan. Selain itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur pendidikan sangat bergantung pada peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk menerapkan kebijakan pendidikan dalam konteks desentralisasi. Kebijakan yang dibuat di tingkat pusat seringkali tidak dapat diterapkan secara optimal di tingkat daerah tanpa adanya kerja sama

yang efektif. Akibatnya, mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan terintegrasi diperlukan untuk program pembangunan infrastruktur pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pendekatan kemitraan (public-private partnership) salah satu untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dapat membantu pemerintah mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat penyediaan pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan terus berlanjut, terutama dalam hal menjaga dan memelihara fasilitas pendidikan yang telah dibangun. Pemerataan pendidikan dapat dicapai melalui pengembangan infrastruktur berbasis teknologi. Pemerintah harus memperluas akses teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di wilayah terpencil, dengan membangun jaringan internet dan menyediakan perangkat pembelajaran digital. Teknologi ini dapat berfungsi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan secara fisik, terutama dalam mendukung pembelajaran

jarak jauh dan menyebarluaskan bahan pelajaran secara lebih merata.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi, pemerintah juga harus memberikan insentif khusus kepada guru yang bekerja di daerah terpencil. Agar proses pembelajaran berhasil, infrastruktur pendidikan yang memadai harus diimbangi dengan ketersediaan guru yang berkualitas. Tenaga pendidik di daerah terpencil dapat menerima insentif seperti tunjangan khusus, fasilitas perumahan, dan peluang pengembangan karier. Sebagaimana dinyatakan dalam teori George Edward III, untuk implementasi kebijakan yang efektif, strategi kebijakan harus didukung oleh komunikasi kebijakan yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang jelas. Tanpa dukungan dari keempat faktor ini, strategi kebijakan yang telah dirumuskan mungkin tidak dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil sangat penting untuk mendorong pemerataan pendidikan yang berkelanjutan di

Indonesia. Ketimpangan yang masih terjadi di wilayah 3T menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pendidikan berkualitas rendah masih tidak merata. Ini terutama berlaku untuk ketersediaan sarana prasarana, distribusi tenaga pendidik, dan dukungan teknologi pembelajaran. Melalui berbagai program pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pendidikan pada dasarnya telah menunjukkan arah yang progresif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan termasuk anggaran yang terbatas, kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan belum berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan lapangan.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis yaitu mencakup aspek kelembagaan dan tata kelola kebijakan. Salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah ketidaksinkronan antara perencanaan pusat dan kebutuhan daerah. Akibatnya, pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif diperlukan, yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing wilayah. Peningkatan alokasi anggaran yang

disesuaikan dengan kebutuhan, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan kerja sama dengan sektor swasta adalah semua langkah kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Selain itu, langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah memanfaatkan teknologi pendidikan dan memberikan insentif kepada guru di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Statistik pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan Indonesia 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator pendidikan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Mulyasa, E. (2014). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Afrianto, Y. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2023. *Jurnal Akuntansi*.

- Wardhana, A., Kharisma, B., & Fauzy, M. Z. (2023). Determinants of educational inequality in provinces in Indonesia. *Jurnal Perspektif*.
- Azzizah, Y. (2021). Educational inequality in Indonesia: Analysis and solutions. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 145–158.
- Prasetyo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Policy of educational equality in underdeveloped areas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 45–60.
- Rahmawati, D. (2022). Infrastructure development and its impact on learning quality. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(3), 210–222.
- Samhaji, S., & Anggara, FD (2025). Analysis of Policy Implementation of Educational Access Equality in Underdeveloped Areas of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Inovasi Kebijakan*, 5(2), 99–112.
- Saputra, R., & Wahyuni, S. (2024). Educational inequality (gap) in elementary schools between cities and 3T areas. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 14(2), 123–135.
- Sari, T. N., & Jasiah. (2025). Building educational justice: Overcoming educational inequality. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 14(2), 136–145.
- problem of educational equality between regions and cities. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, 6(4), 1732–1740